

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Gambaran Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka. Pada Penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran dan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi. untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kinerja keuangan Kabupaten Malaka.

Adapun Laporan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Malaka tahun anggaran 2017-2021 yang dilampirkan sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Total Pendapatan Daerah (Rp)</b>	<b>Total Belanja Daerah (Rp)</b>	<b>Total Pembiayaan Daerah (Rp)</b>
2017	823.512.988.697	826.431.213.709	78.967.688.298
2018	753.814.119.597	772.784.467.689	66.314.540.305
2019	840.577.663.671	796.298.947.984	40.076.217.508
2020	760.111.897.589	809.552.027.293	82.760.631.759
2021	863.572.828.349	795.040.558.503	24.626.443.330

*Sumber: Data BPKPD Kabupaten Malaka.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari segi total pendapatan daerah Kabupaten Malaka tahun 2017 mendapatkan sebesar Rp 823.512.988.697, pada tahun 2018 pendapatan daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 753.814.119.597, pada tahun 2019 pendapatan daerah kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 840.577.663.671, pada tahun 2020 pendapatan

daerah kembali mengalami penurunan sebesar Rp 760.111.897.598 dan pada tahun 2021 pendapatan daerah kembali mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp 863.572.828.349 ini dikarenakan adanya penyebab suatu virus covid-19 yang memberikan dampak terhadap pendapatan daerah Kabupaten Malaka.

Dari segi total belanja daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Malaka dari tahun 2017 total belanja daerah sebesar Rp 826.431.213.709, pada tahun 2018 total belanja mengalami penurunan sebesar Rp 772.784.467.689, pada tahun 2019 total belanja daerah kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 796.298.947.984, pada tahun 2020 total belanja daerah kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 809.552.027.293 dan pada tahun 2021 total belanja daerah kembali mengalami penurunan sebesar Rp 795.040.558.504.

Dari segi total pembiayaan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Malaka dari tahun 2017 sebesar Rp 78.967.688.298, pada tahun 2018 total pembiayaan daerah mengalami penurunan sebesar Rp 66.314.540.395, pada tahun 2019 total pembiayaan daerah mengalami penurunan sebesar Rp 40.076.217.508, pada tahun 2020 total pembiayaan daerah kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 82.760.631.759 dan pada tahun 2021 total pembiayaan daerah kembali mengalami penurunan sebesar Rp 24.626.443.330.

Data yang dikumpulkan dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka tahun Anggaran 2017-2021 diolah menggunakan analisis rasio keuangan berupa, Rasio Analisis varians Pendapatan, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio

Derajat Kontribusi BUMD, Rasio Analisis varians Belanja, Rasio Pertumbuhan Belanja, Rasio Belanja Operasi, Rasio Belanja Modal, Rasio Efisiensi Belanja, SiLPA Tahun Lalu.

## 5.2 Analisis dan pembahasan

### 5.2.1 Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis dapat digambarkan sebagai kemampuan suatu pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan tanpa melebihi jumlah yang dianggarkan untuk mengukur Analisis Varians Pendapatan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Analisis Varians pendapatan} = \text{Realisasi Pendapatan} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

**Tabel 5.2**  
**Kriteria Analisis Varians Pendapatan**

Kriteria Varians Pendapatan	Persentase
Tidak Baik	0% - 50%
Kurang Baik	50% - 100%
Baik	>100%

Sumber: Mahmudi, 2019

**Tabel 5.3**  
**Perhitungan Analisis Varians Pendapatan Daerah**

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Varians/Selisih (Rp)	Kriteria
2017	835.270.274.407	823.512.988.697	(11.757.285.710)	Kurang Baik
2018	786.902.238.114	753.814.119.597	(33.088.118.517)	Kurang Baik
2019	874.885.113.024	840.577.663.671	(34.307.449.353)	Kurang Baik
2020	794.231.215.624	760.111.897.589	(34.119.318.035)	Kurang Baik
2021	893.243.696.573	863.572.828.349	(29.670.868.224)	Kurang Baik
<b>Total</b>	<b>4.184.532.537.742</b>	<b>4.041.589.497.903</b>	<b>(142.943.039.839)</b>	Kurang Baik

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan tabel perhitungan analisis varians pendapatan daerah di atas dapat dilihat bahwa semua realiasi pedapatan daerah dari tahun 2017-

2021 lebih kecil daripada anggaran. Menurut (Mahmudi, 2010) Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja baik apabila memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan begitu sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan maka hal tersebut dinilai kurang baik.

### 5.2.2 Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan pendapatan untuk mengetahui apakah kinerja anggaran pemerintah mengalami kenaikan atau penurunan pertumbuhan pendapatan selama beberapa periode tahun anggaran (Mahmudi,2019:137).

Rumus yang di gunakan untuk mengukur Rasio pertumbuhan Pendapatan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan Thn } t = \frac{\text{Pendapatan Thn } t - \text{Pendapatan Thn}(t - 1)}{\text{Pendapatan Thn } (t - 1)} \times 100\%$$

Kriteria	Persentase
Rendah	0% - 25%
Sedang	25% - 50%
Tinggi	50% - 100%

Sumber: Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 823.512.988.697 - \text{Rp } 658.502.838.380}{\text{Rp } 658.502.838.380} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 165.010.150.317}{\text{Rp } 658.502.838.380} \times 100\% \\ &= 0,25058381 \times 100\% \\ &= 25,05 \% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp } 753.814.119.597 - \text{Rp } 823.512.988.697}{\text{Rp } 823.512.988.697} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } - 69.698.869.100}{\text{Rp } 823.512.988.697} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -0,08463602 \times 100\% \\
&= -8,46\% \\
\text{Tahun 2019} &= \frac{Rp\ 840.577.663.671 - Rp\ 753.814.119.597}{Rp\ 753.814.119.597} \times 100\% \\
&= \frac{Rp\ 86.763.544.074}{Rp\ 753.814.119.597} \times 100\% \\
&= 0,11509938 \times 100\% \\
&= 11,50\% \\
\text{Tahun 2020} &= \frac{Rp\ 760.111.897.589 - Rp\ 840.577.663.671}{Rp\ 840.577.663.671} \times 100\% \\
&= \frac{Rp\ -80.465.766.082}{Rp\ 840.577.663.671} \times 100\% \\
&= 0,09572674 \times 100\% \\
&= -9,57\% \\
\text{Tahun 2021} &= \frac{Rp\ 863.572.828.349 - Rp\ 760.111.897.589}{Rp\ 760.111.897.589} \times 100\% \\
&= \frac{Rp\ 103.460.930.760}{Rp\ 760.111.897.589} \times 100\% \\
&= 0,13611276 \times 100\% \\
&= 13,61\%
\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka akan nampak pada tabel berikut ini:

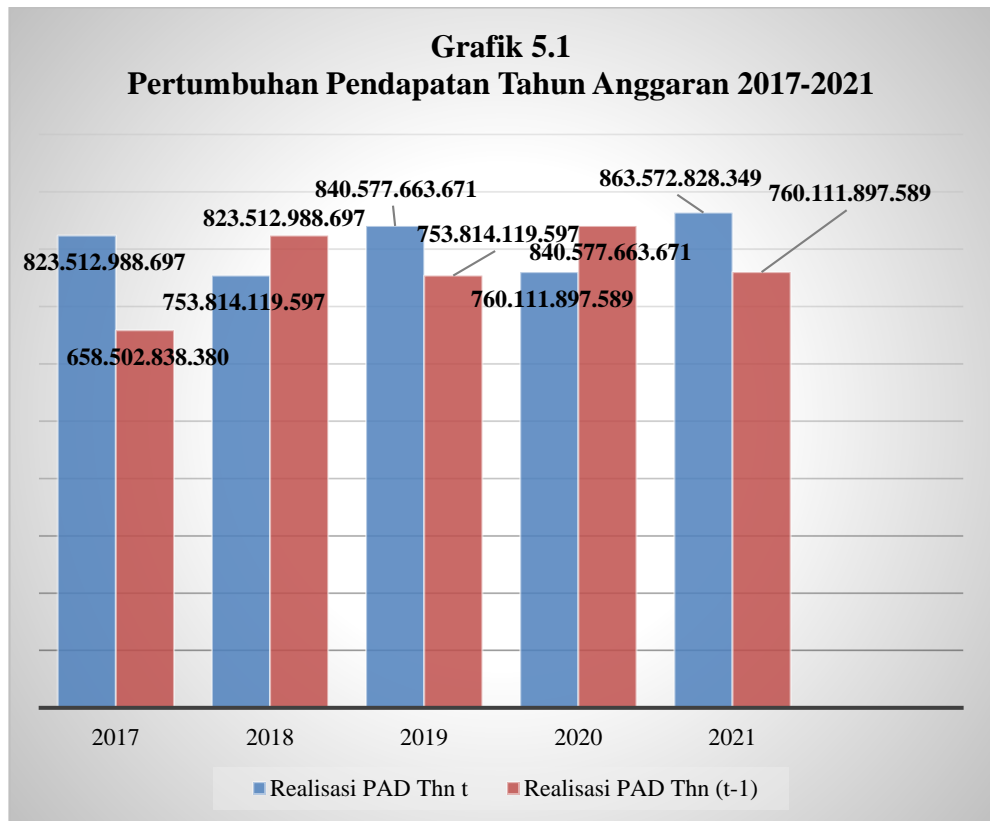
**Tabel 5.4**  
**Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan**

Tahun	Realisasi PAD Thn t (Rp)	Realisasi PAD Thn (t-1) (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2017	823.512.988.697	658.502.838.380	25.05	Sedang
2018	753.814.119.597	823.512.988.697	-8.46	Rendah
2019	840.577.663.671	753.814.119.597	11.50	Rendah
2020	760.111.897.589	840.577.663.671	-9.57	Rendah
2021	863.572.828.349	760.111.897.589	13.61	Rendah
RATA-RATA			6,43	Rendah

*Sumber: Data diolah 2023*

Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan untuk pemerintah daerah Kabupaten Malaka tahun 2017-2021 menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan persentase rata-rata pertumbuhan pendapatan

sebesar 6,43% dengan kriteria Rendah. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Malaka belum mampu mempertahankan pertumbuhan pendapatan sehingga pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak stabil. Pertumbuhan pendapatan paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 25,06% dan pertumbuhan pendapatan paling rendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar -8,46%. Pertumbuhan pendapatan seharusnya dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan (trend) yang cenderung meningkat atau positif. sehingga mencerminkan peningkatan kinerja keuangan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Malaka seharusnya dapat mendominasi pendapatan asli daerah agar penerimaan pendapatan semakin besar dan dapat digunakan sebagai biaya pembangunan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas maka akan nampak pada grafik berikut ini: Berikut dapat dilihat grafik trend pertumbuhan pendapatan tahun anggaran 2017-2021:



Sumber: Data diolah 2023.

### 5.2.3 Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau dana perimbangan. Semakin tinggi rasio angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin mandiri keuangan daerahnya. (Mahmudi 2010:142).

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

**Tabel 5.5**  
**Tingkat Kemampuan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian</b>
Rendah Sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

*Sumber : Mahmudi, 2010*

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{Rp\ 54.789.189.990}{Rp\ 768.723.798.707} \times 100\% \\ &= 0,07127293 \times 100\% \\ &= 7,13\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{Rp\ 41.059.361.102}{Rp\ 693.118.098.495} \times 100\% \\ &= 0,05923862 \times 100\% \\ &= 5,92\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{Rp\ 49.196.959.327}{Rp\ 751.892.416.026} \times 100\% \\ &= 0,06543084 \times 100\% \\ &= 6,54\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{Rp\ 54.531.409.057}{Rp\ 570.234.534.563} \times 100\% \\ &= 0,095622979 \times 100\% \\ &= 9,56\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{Rp\ 55.380.883.238}{Rp\ 785.407.444.159} \times 100\% \\ &= 0,07051229 \times 100\% \\ &= 7,05\% \end{aligned}$$



Berdasarkan perhitungan diatas maka akan nampak pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.6**  
**Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian**

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Rp)</b>	<b>Pendapatan Transfer (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Kriteria</b>
2017	54.789.189.990	768.723.798.707	7.13	Rendah Sekali
2018	41.059.361.102	693.118.098.495	5.92	Rendah Sekali
2019	49.196.959.327	751.892.416.026	6.54	Rendah Sekali
2020	54.531.409.057	570.234.534.563	9.56	Rendah Sekali
2021	55.380.883.238	785.407.444.159	7.05	Rendah Sekali
<b>RATA-RATA</b>			<b>7.24</b>	<b>Rendah Sekali</b>

*Sumber: Data diolah 2023.*

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa selama lima tahun terakhir rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malaka di kategorikan sangat rendah. Hal ini sesuai dengan kriteria penilaian tingkat kemandirian keuangan daerah yang menempatkan Kabupaten Malaka dengan nilai rata-rata rasio kemandirian sebesar 7,24% artinya Pemerintah Malaka tidak mampu mengelola keuangannya secara mandiri. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malaka dari tahun 2017-2021 terus mengalami fluktuasi. Kontribusi dana transfer dari pemerintah provinsi maupun pusat juga mengalami peningkatan sehingga pendapatan transfer kembali mendominasi penerimaan pendapatan daerah.

#### **5.2.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer, yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio

ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Rumus untuk menghitung Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 5.7**  
**Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah**

Presentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Mahmudi, 2010

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 768.723.798.707}{\text{Rp } 823.512.988.697} \times 100\% \\ &= 0,93346894 \times 100\% \\ &= 93,35\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp } 693.118.098.495}{\text{Rp } 753.512.988.697} \times 100\% \\ &= 0,91948144 \times 100\% \\ &= 91,95\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp } 751.892.416.02}{\text{Rp } 840.577.665.671} \times 100\% \\ &= 0,89449487 \times 100\% \\ &= 89,45\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp } 570.234.534.563}{\text{Rp } 760.111.897.589} \times 100\% \\ &= 0,75019814 \times 100\% \\ &= 75,02\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp } 785.407.444.159}{\text{Rp } 863.572.828.349} \times 100\% \\
&= 0,90948605 \times 100\% \\
&= 90,95\%
\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka akan nampak pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.8**  
**Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Transfer (Rp)</b>	<b>Total Pendapatan Daerah (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Kriteria</b>
2017	768.723.798.707	823.512.988.697	93.35	Sangat Tinggi
2018	693.118.098.495	753.814.119.597	91.95	Sangat Tinggi
2019	751.892.416.026	840.577.663.671	89.45	Sangat Tinggi
2020	570.234.534.563	760.111.897.589	75.02	Sangat Tinggi
2021	785.407.444.159	863.572.828.349	90.95	Sangat Tinggi
RATA-RATA			88.14	Sangat Tinggi

*Sumber: Data diolah 2023*

Dengan memperhatikan hasil perhitungan dari rasio ketergantungan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Malaka, kondisi keuangan dari tahun 2017-2021 sangat tinggi dengan rata-rata sebesar 88,14%. Hasil ini menunjukkan ketergantungan keuangan daerah yang dialami oleh Kabupaten Malaka masih tinggi. Hal ini sesuai dengan kriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah lebih dari 50% merupakan kriteria sangat tinggi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Malaka masih sangat tinggi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah ini disebabkan masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah

dibandingkan dengan pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah. Hal tersebut merupakan persoalan yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah Daerah Kabupaten Malaka untuk lebih mengoptimalkan, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber dan potensi-potensi riil yang dimiliki oleh Kabupaten Malaka.

### 5.2.5 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio ini merupakan derajat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. (Mahmudi 2010:142).

Rumus untuk menghitung Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 5.9**  
**Kriteria Penilaian Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal**

Presentase PAD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Mahmudi 2010

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 54.789.189.990}{\text{Rp } 823.512.988.697} \times 100\% \\ &= 0,06653105 \times 100\% \\ &= 6,65\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp } 41.059.361.102}{\text{Rp } 753.814.119.597} \times 100\% \\ &= 0,05446881 \times 100\% \\ &= 5,45\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp } 49.196.959.327}{\text{Rp } 840.577.663.671} \times 100\% \\ &= 0,58527559 \times 100\% \\ &= 5,85\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp } 54.531.409.057}{\text{Rp } 760.111.897.589} \times 100\% \\ &= 0,07174129 \times 100\% \\ &= 7,17\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp } 55.380.883.238}{\text{Rp } 863.572.828.349} \times 100\% \\ &= 0,06412995 \times 100\% \\ &= 6,41\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka akan nampak pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.10**  
**Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Persentas (%)	Kriteria
2017	54.789.189.990	823.512.988.697	6.65	Sangat Kurang
2018	41.059.361.102	753.814.119.597	5.45	Sangat Kurang
2019	49.196.959.327	840.577.663.671	5.85	Sangat Kurang
2020	54.531.409.057	760.111.897.589	7.17	Sangat Kurang
2021	55.380.883.238	863.572.828.349	6.41	Sangat Kurang
RATA-RATA			6.31	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah 2023

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun terakhir rasio derajat desentralisasi fiskal dengan rata -rata sebesar

6,31% masuk dalam kriteria sangat kurang artinya Pemerintah Kabupaten Malaka kurang maksimal dalam menyelenggarakan desentralisasi serta kurang mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

### 5.2.6 Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan realiasi penerimaan PAD dengan target PAD atau yang dianggarkan sebelumnya (Mahmudi 2010:143).

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Efektivitas PAD adalah sebagai berikut :

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD} 100\%$$

**Tabel 5.11**  
**Kriteria Penilaian Efektivitas**

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi,2010

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{Rp\ 54.789.189.990}{Rp\ 53.308.478.854} \times 100\% \\ &= 1,02777627 \times 100\% \\ &= 102,78\% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{Rp\ 41.059.361.102}{Rp\ 44.644.364.769} \times 100\%$$

$$= 0,91969862 \times 100\%$$

$$= 91,97\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp } 49.196.959.327}{\text{Rp } 56.326.116.137} \times 100\%$$

$$= 0.87343070 \times 100\%$$

$$= 87,34 \%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 54.531.409.057}{\text{Rp } 46.438.609.551} \times 100\%$$

$$= 1,17426877 \times 100\%$$

$$= 117,04\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp } 55.380.883.238}{\text{Rp } 58.937.197.057} \times 100$$

$$= 0,93965925 \times 100\%$$

$$= 93,97\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka akan nampak pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.12**  
**Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas**

<b>Tahun</b>	<b>Target PAD (Rp)</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Kriteria</b>
2017	53.308.478.854	54.789.189.990	102.78	Sangat Efektif
2018	44.644.364.769	41.059.361.102	91.97	Cukup Efektif
2019	56.326.116.137	49.196.959.327	87.34	Kurang Efektif
2020	46.438.609.551	54.351.409.057	117.04	Sangat Efektif
2021	58.937.197.457	55.380.883.238	93.97	Cukup Efektif
<b>RATA-RATA</b>			<b>98.62</b>	<b>Cukup Efektif</b>

*Sumber: Data diolah 2023*

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 5.12 di atas, dapat dilihat pada tahun 2017 rasio efektivitas sebesar 102,78% masuk dalam kriteria sangat efektif yang artinya Pemerintah Kabupaten Malaka mampu merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pada tahun 2018 rasio efektivitas mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi sebesar 91,97% masuk dalam kriteria cukup efektif yang artinya Pemerintah Kabupaten Malaka cukup mampu merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Tahun 2019 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi sebesar 87,34% masuk dalam kriteria kurang efektif yang artinya Pemerintah Kabupaten Malaka belum mampu secara maksimal dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena realisasi PAD tidak mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2020 rasio efektivitas mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 117,04% masuk dalam kriteria sangat efektif yang artinya Pemerintah Kabupaten Malaka sangat mampu merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dan pada tahun 2021 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi sebesar 93,97% masuk dalam kriteria cukup efektif yang artinya Pemerintah Kabupaten Malaka cukup mampu merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.



### 5.2.7 Rasio Efisiensi PAD

Rasio Efisiensi Rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Rumus yang di gunakan untuk menghitung Rasio Efisiensi sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 5.13**  
**Kriteria Penilaian Efisiensi**

Presentase	Kriteria
<10%	Sangat Efisien
10%-20%	Efisien
21%-30%	Cukup Efisien
31%-40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi, 2010

$$\begin{aligned} \text{Tahun} &= \frac{\text{Rp } 2.739.459.495}{\text{Rp } 54.789.189.900} \times 100\% \\ &= 0,05 \times 100\% \\ &= 5\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp } 2.052.968.055}{\text{Rp } 41.059.361.102} \times 100\% \\ &= 0,05 \times 100\% \\ &= 5\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp } 2.459.847.966}{\text{Rp } 49.196.959.327} \times 100\% \\ &= 0,05 \times 100\% \\ &= 5\% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 2.726.570.452}{\text{Rp } 54.531.409.057} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
&= 0,05 \times 100\% \\
&= 5\% \\
\text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp } 2.769.044.161}{\text{Rp } 55.380.883.238} \times 100\% \\
&= 0,05 \times 100\% \\
&= 5\%
\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka akan nampak pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.14**  
**Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi PAD**

<b>Tahun</b>	<b>Biaya Pemungutan PAD (Rp)</b>	<b>Realisasi Penerimaan PAD (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Kriteria</b>
2017	2.739.459.495	54.789.189.990	5	Sangat efisien
2018	2.052.968.055	41.059.361.102	5	Sangat efisien
2019	2.459.847.966	49.196.959.327	5	Sangat efisien
2020	2.726.570.452	54.531.409.027	5	Sangat efisien
2021	2.769.044.161	55.380.883.238	5	Sangat efisien
<b>RATA-RATA</b>			<b>5</b>	<b>Sangat Efisien</b>

*Sumber: Data diolah 2023*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun terakhir rasio efisiensi dengan rata-rata 5% masuk dalam kriteria Sangat Efisien yang artinya Pemerintah Kabupaten Malaka tidak maksimal dalam pengelolaan belanja daerah dan realisasi penerimaan PAD.

### **5.2.8 Rasio Derajat Kontribusi BUMD**

Rasio Derajat Kontribusi BUMD Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan asli daerah

Rumus Rasio Derajat Kontribusi BUMD sebagai berikut :

$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$
--

**Tabel 5.15**  
**Kriteria Derajat Kontribusi BUMD**

<b>Kriteria Efisiensi</b>	<b>Presentase Efisiensi</b>
Sangat Baik	>50%
Baik	40%-50%
Sedang	30%-40%
Cukup	20%-30%
Kurang	10%-20%
Sangat Kurang	<10%

*Sumber: Abdul Halim, 2004*

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 232.398.357}{\text{Rp } 54.789.189.990} \times 100\% \\ &= 0,00424168 \times 100\% \\ &= 0,42\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp } 3.512.871.635}{\text{Rp } 41.059.361.102} \times 100\% \\ &= 0,08555592 \times 100\% \\ &= 8,56\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp } 4.970.477.432}{\text{Rp } 49.196.959.327} \times 100\% \\ &= 0,10103220 \times 100\% \\ &= 10,10\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp } 5.995.142.215}{\text{Rp } 54.531.409.057} \times 100\% \\ &= 0,10993925 \times 100\% \\ &= 10,99\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp } 7.209.673.480}{\text{Rp } 55.389.883.238} \times 100\% \\ &= 0,13018343 \times 100\% \\ &= 13,02\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka akan nampak pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.16**  
**Hasil Perhitungsn Rasio Derajat Kontribusi BUMD**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Laba BUMD (Rp)</b>	<b>Penerimaan PAD (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Kriteria</b>
2017	232.398.357	54.789.189.990	0.42	Sangat Kurang
2018	3.512.871.635	41.059.361.102	8.56	Sangat Kurang
2019	4.970.477.432	49.196.959.327	10.10	Kurang
2020	5.995.142.215	54.531.409.057	10.99	Kurang
2021	7.209.673.480	55.389.883.238	13.02	Kurang
RATA-RATA			8.62	Sangat Kurang

*Sumber: Data diolah 2023*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun terakhir rasio derajat kontribusi BUMD dari tahun 2017-2021 dengan rata-rata sebesar 8,62% masuk dalam kriteria sangat kurang yang artinya bahwa tingkat kontribusi Pemerintah Kabupaten Malaka dalam mendukung pendapatan daerah belum sepenuhnya terpenuhi.

### **5.3 Rasio Belanja Daerah**

Belanja daerah (APBD) mengamanatkan agar rencana alokasi belanja lebih mengutamakan keperpihakan untuk kepentingan publik (belanja operasi) dari pada kepentingan aparatur (belanja modal). Berdasarkan uraian data tersebut peneliti akan melakukan analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan dilihat dari belanja daerah Kabupaten Malaka.

### 5.3.1 Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis belanja daerah merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikatakan tidak baik jika terdapat selisih (realisasi belanja lebih dari jumlah yang dianggarkan). Selisih dalam analisis ini dapat dikategorikan dalam 2 jenis yaitu selisih yang disukai yaitu selisih yang terjadi saat realisasi lebih kecil dari anggaran sedangkan yang ke 2 selisih yang tidak disukai yaitu selisih yang terjadi jika realisasi lebih besar dari anggrannya. Rasio analisis varians belanja daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

**Tabel 5.17**  
**Kriteria Analisis Varians Belanja**

Kriteria Varians Belanja	Persentase
Tidak Baik	0% - 49%
Cukup Baik	50% - 99%
Baik	> 100%

Sumber: Mahmudi, 2019

**Tabel 5.18**  
**Perhitungan Varians Belanja**

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Varians/Selisih (Rp)	Kriteria
2017	915.295.420.041	826.431.213.709	(88.864.206.332)	Cukup Baik
2018	853.619.701.338	772.784.467.689	(80.,835.233.649)	Cukup Baik
2019	894.540.312.212	796.298.947.984	(98.241.364.228)	Cukup Baik
2020	860.921.831.478	809.552.027.293	(51.369.804.185)	Cukup Baik
2021	916.665.240.334	795.040.558.503	(121.624.681.831)	Cukup Baik
<b>Total</b>	<b>4.441.042.505.403</b>	<b>4.000.107.215.178</b>	<b>(440.935.290.225)</b>	Cukup Baik

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan tabel perhitungan analisis varians belanja daerah selama tahun 2017-2021 pada Kabupaten Malaka di katakan Cukup Baik terlihat bahwa realisasi belanja tidak melebihi anggaran belanja. Menurut (Mahmudi, 2010) Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan begitu sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan maka hal tersebut dinilai kurang baik.

### 5.3.2 Rasio Pertumbuhan Belanja

Rasio Pertumbuhan Belanja merupakan analisi rasio yang bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja daerah dari tahun ke tahun.pada umumnya belanja daerah kecenderungan untuk selalu naik karena adanya inflasi,perubahan kurs rupiah,penyesuaian faktor rkonomi dan lain-lain namun pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belaja daerah dengan melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran (mahmudi,2019:158).

Rumus Rasio Pertumbuhan Belanja adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Thn } t = \frac{\text{Pertumbuhan Belanja Thn} - \text{Realisasi Belanja Thn}(t - 1)}{\text{Realisasi Belanja Thn } (t - 1)} \times 100\%$$

**Tabel 5.19**  
**Kriteria Pertumbuhan Belanja Daerah**

<b>Kriteria</b>	<b>Persentase</b>
Rendah	0%-25%
Sedang	25%-50%
Tinggi	50%-100%

*Sumber :Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh*

$$\begin{aligned}
\text{Tahun 2017} &= \frac{Rp\ 826.431.213.709 - Rp\ 705.984.084.768}{Rp\ 705.984.084.768} \times 100\% \\
&= \frac{Rp\ 120.447.128.941}{Rp\ 705.984.084.768} \times 100\% \\
&= 0,17060884 \times 100\% \\
&= 17,06\%
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Tahun 2018} &= \frac{Rp\ 772.784.467.689 - Rp\ 826.431.213.709}{Rp\ 826.431.213.709} \times 100\% \\
&= \frac{Rp\ (53.646.746.020)}{Rp\ 826.431.213.709} \times 100\% \\
&= -0,06491374 \times 100\% \\
&= -6,49\%
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Tahun 2019} &= \frac{Rp\ 796.298.947.984 - Rp\ 772.784.467.689}{Rp\ 772.784.467.689} \times 100\% \\
&= \frac{Rp\ 23.514.480.295}{Rp\ 772.784.467.689} \times 100\% \\
&= 0,03042825 \times 100\% \\
&= 3,04\%
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Tahun 2020} &= \frac{Rp\ 809.552.027.293 - Rp\ 796.298.947.984}{Rp\ 796.298.947.984} \times 100\% \\
&= \frac{Rp\ 13.253.079.309}{Rp\ 796.298.947.984} \times 100\% \\
&= 0,01664334 \times 100\% \\
&= 1,66\%
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Tahun 2021} &= \frac{Rp\ 795.040.558.503 - Rp\ 809.552.027.293}{Rp\ 809.552.027.293} \times 100\% \\
&= \frac{Rp\ (14.512.468.790)}{Rp\ 809.552.027.293} \times 100\%
\end{aligned}$$

$$= -0,01792654 \times 100\%$$

$$= 1,79\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka akan nampak pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.20**  
**Hasil Perhitungan Pertumbuhan Belanja**

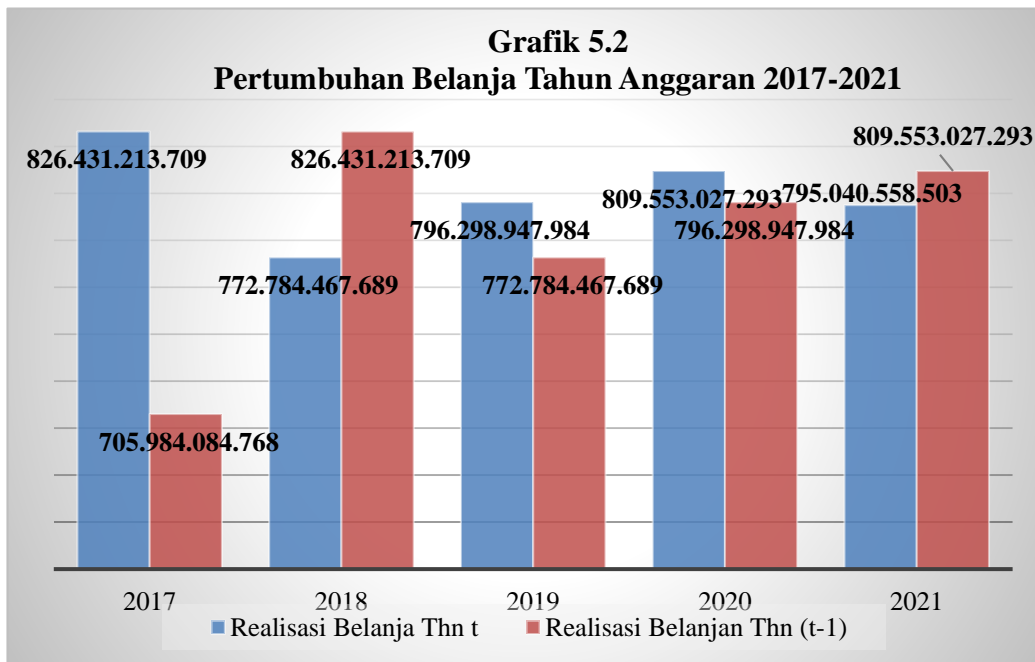
<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Belanja Thn t (Rp)</b>	<b>Realisasi Belanja Thn (t-1) (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Kriteria</b>
2017	826.431.213.709	705.984.084.768	17.06	Rendah
2018	772.784.467.689	826.431.213.709	(6.49)	Rendah
2019	796.298.947.984	772.784.467.689	3.04	Rendah
2020	809.553.027.293	796.298.947.984	1.66	Rendah
2021	795.040.558.503	809.553.027.293	(1.79)	Rendah
RATA-RATA			2.70	Rendah

*Sumber: Data diolah 2023*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun terakhir rasio pertumbuhan belanja dengan rata-rata sebesar 2,70% masuk dalam kriteria rendah yang artinya Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dalam belanja modal belum memprioritaskan dalam hal mengenai pembangunan daerah dan lain sebagainya.

Berikut dapat dilihat grafik trend pertumbuhan belanja tahun anggaran 2017-2021:





Sumber: Data diolah 2023

### 5.3.3 Rasio Keserasian Belanja

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentasinya dana yang dialokasikan untuk biaya operasi, berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\text{Belanja operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 593.083.654.412}{\text{Rp } 826.431.121.709} \times 100\% \\ &= 0,71764309 \times 100\% \\ &= 71,76\% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 633.769.136.696}{\text{Rp } 772.784.467.689} \times 100\%$$

$$= 0,85893177 \times 100\%$$

$$= 82,01\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp } 655.224.205.575}{\text{Rp } 796.298.947.984} \times 100\%$$

$$= 0,82288369 \times 100\%$$

$$= 82,28\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 723.100.264.329}{\text{Rp } 809.552.027.293} \times 100\%$$

$$= 0,89321036 \times 100\%$$

$$= 89,33\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp } 496.199.421.761}{\text{Rp } 795.040.558.503} \times 100\%$$

$$= 0,62411837 \times 100\%$$

$$= 62,41\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka akan nampak pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.22**  
**Hasil Perhitungan Rasio Belanja Operasi**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Belanja Operasi (Rp)</b>	<b>Total Belanja Daerah (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2017	593.083.654.412	826.431.213.709	71.76
2018	633.769.136.969	772.784.467.689	82.01
2019	655.224.205.575	796.298.947.984	82.28
2020	723.100.264.329	809.552.027.293	89.32
2021	496.199.421.761	795.040.558.503	62.41
<b>RATA-RATA</b>			<b>77.56</b>

*Sumber: Data diolah 2023*

Dari penjelasan diatas rata-rata dari rasio efisien belanja Kabupaten Malaka yaitu sebesar 77,56%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam

belanja operasi pemerintah Kabupaten Malaka sangat tinggi dalam membelanjakan kegiatan-kegiatan yang ada dan belanja operasi yang tinggi, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Rumus yang digunakan untuk belanja modal adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 222.048.971.977}{\text{Rp } 826.431.213.709} \times 100\% \\ &= 0,26868415 \times 100\% \\ &= 26,87\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp } 128.957.638.492}{\text{Rp } 772.784.467.689} \times 100\% \\ &= 0,16687400 \times 100\% \\ &= 16,69\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp } 141.074.742.408}{\text{Rp } 796.298.947.984} \times 100\% \\ &= 0,17716304 \times 100\% \\ &= 17,72\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp } 77.981.322.988}{\text{Rp } 809.552.027.293} \times 100\% \\ &= 0,09632651 \times 100\% \\ &= 9,63\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp } 119.311.564.719}{\text{Rp } 795.040.558.503} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 0,15009493 \times 100\%$$

$$= 15,01$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka akan nampak pada tabel berikut ini

**Tabel 5.21**  
**Hasil Perhitungan Rasio Belanja Modal**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Belanja Modal (Rp)</b>	<b>Total Belanja Daerah (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2017	222.048.971.977	826.431.213.709	26.87
2018	128.957.638.492	772.784.467.689	16.69
2019	141.074.742.408	796.298.947.984	17.72
2020	77.981.322.988	809.552.027.293	9.63
2021	119.311.564.719	795.040.558.503	15.01
RATA-RATA			17.18

*Sumber: Data diolah 2023*

Dilihat dari perhitungan, sebagian dana yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Malaka masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif rendah. Pemerintah Kabupaten Malaka lebih banyak mengeluarkan biaya rutin untuk memenuhi belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk pemerintah Kabupaten Malaka relatif kecil dalam membiayai pembangunan daerah, dan sebagian besar dana belanja operasi digunakan untuk belanja pegawai.

#### **5.3.4 Rasio Efisiensi Belanja**

Rasio Efisiensi Belanja perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio Efisiensi Belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan.

Rumus Rasio Efisiensi Belanja adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 5.23**  
**Tingkat Efisiensi Belanja**

<b>Presentase Efisiensi Belanja</b>	<b>Kriteria</b>
100% ke atas	Tidak Efisien
90% -100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
70%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

*Sumber : Mahmudi, 2010*

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 826.431.213.709}{\text{Rp } 915.295.420.041} \times 100\% \\ &= 0,90291199 \times 100\% \\ &= 90,29\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp } 772.784.467.689}{\text{Rp } 853.619.701.338} \times 100\% \\ &= 0,90530298 \times 100\% \\ &= 90,54\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp } 769.298.947.984}{\text{Rp } 894.540.312.212} \times 100\% \\ &= 0,89017670 \times 100\% \\ &= 89,02\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp } 809.552.027.293}{\text{Rp } 860.921.831.478} \times 100\% \\ &= 0,94033162 \times 100\% \\ &= 94,04\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp } 795.040.558.503}{\text{Rp } 916.665.240.334} \times 100\% \\ &= 0,86731832 \times 100\% \end{aligned}$$

= 86,74%

Berdasarkan perhitungan diatas maka akan nampak pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.24**  
**Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Belanja (Rp)</b>	<b>Realisasi Belanja (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Kriteria</b>
2017	915.295.420.041	826.431.213.709	90.29	Kurang Efisien
2018	853.619.701.338	772.784.467.689	90.53	Kurang Efisien
2019	894.540.312.212	796.298.947.984	89.02	Cukup Efisien
2020	860.921.831.478	809.552.027.293	94.03	Kurang Efisien
2021	916.665.240.334	795.040.558.503	86.73	Cukup Efisien
RATA-RATA			90.12	Kurang Efisien

*Sumber: Data diolah 2023*

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisien belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dengan rata-rata 90,12 masuk dalam kriteria kurang efisien yang artinya Pemerintah Kabupaten Malaka yang memakai perhitungan realisasi belanja dibagi dengan anggaran belanja, berarti pemerintah melakukan penghematan anggaran dari total anggaran yang dianggarkan itu juga berlaku untuk tahun ke tahun berikutnya.

## **5.4 Rasio Pembiayaan**

### **5.4.1 Silpa Tahun Lalu**

Sisa lebih pembiayaan lebih anggaran tahu lalu pada umumnya pos SILPA akan menjadi alternarif pertama yang akan digunakan pemerintah daerah apabila terjadi defisit anggaran.

Rumus SILPA tahun lalu adalah sebagai berikut :

$$\text{Silpa} = \text{Surplus/Defisit} + \text{Pembiayaan Netto}$$

Tahun 2017 = Rp (2.918.225.001) + Rp78.967.688.298 = Rp 76.049.463.287

Tahun 2018 = Rp (18.970.348.092) + Rp 66.314.540.305 = Rp 47.345.192. 213

Tahun 2019 = Rp 42.659.284.056 + Rp 40.076.217.50 = Rp 82,735,501,564

Tahun 2020 =Rp (49.440.129.704) + Rp 82.760.631.759= Rp 33.320.502.055

Tahun 2021 = Rp 68.532.269.845 + Rp 24.626.443.330 = Rp 93.158.713.175

**Tabel 5.25**  
**Hasil Perhitungan Penggunaan Silpa**

<b>Tahun</b>	<b>Surplus/Defisit (Rp)</b>	<b>Pembiayaan Netto (Rp)</b>	<b>Hasil (Rp)</b>
2017	(2.918.225.011)	78.967.688.298	76.049.463.287
2018	(18.970.348.092)	66.315.540.305	47.345.192.213
2019	42.659.284.056	40.076.217.508	82.735.501.564
2020	(49.440.129.704)	82.760.631.579	33.320.501.875
2021	68.532.269.845	24.626.443.330	93.158.713.175
<b>RATA-RATA</b>			<b>66.521.874.423</b>

*Sumber: Data diolah 2023*

Berdasarkan hasil perhitungan penggunaan Silpa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka. Pada tahun 2017 menunjukkan penggunaan Silpa sebesar Rp 76.049.463.287 . Pada tahun 2018 mengalami penurunan sehingga penggunaan Silpa yang didapat menjadi Rp 47.345.192.213. Pada tahun 2019 penggunaan Silpa meningkat menjadi Rp 82.735.501.564. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga penggunaan Silpa menjadi Rp 33.320.502.055. Dan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp 93.158.713.175. Rata-rata dari penggunaan Silpa Kabupaten Malaka yaitu sebesar Rp 66521.874.423.

## **5.5 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.**

### **1. Sumber Daya Manusia**

*“Pada tahun 2017, 2018 sampai 2019 itu jumlah aparat di daerah yang memiliki background ekonominya masih sedikit dan yang masih minim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan itu membuktikan SDM itu penting tidak hanya ilmu tapi pengetahuan”.*

### **2. Sarana Prasarana**

*“Pada 2017 2018 pengoperasian menggunakan komputer yang sudah lama dan komputernya terbatas, jadi faktor infrastruktur berpengaruh terhadap kinerja. Sarana prasarana salah satu faktor yang penting juga untuk mengukur kinerja keuangan.*

### **3. Finansial**

*“Dana harus ditetapkan secara real tidak asal ambil, biaya untuk ambil 1 tahun harus ditetapkan di APBD supaya bisa digunakan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja keuangan. Kinerja keuangan tidak hanya ukur dalam bkd tapi sasu kab. Artinya semua peralatan. Yang ada di kab ini turun terlibat berkontribusi untuk meningkatkan kinerja”.*

### **4. Regulasi**

*“Harus diatur dalam sebuah regulasi menjamin semua kemauan itu harus di atur ikut pemerintah. Aturan itu bisa diatur ikut aturan tertinggi bisa dijabarkan dalam aturan prasarana terendah itu adalah peraturan bupati ada UU, PP, turun ke peraturan menteri tertua turun lagi ke peraturan daerah dijabarkan lagi ke abstrak bupati. paling rendah lagi surat edaran”.*